



Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

Dewi Kusuma Wardani^{1*}, Klaudius Getadismanto²

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Eknomomi, Universitas Sarjanawiyata
Tamansiswa

Email:d3wikusuma@gmail.com*, aldhymantho01@gmail.com

ABSTRAK

Mengacu pada upaya pemerintah dalam meminimalkan terjadinya kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan serta menguji peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan jumlah sampel sebanyak 85 Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret–April 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Selain itu, komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal dan semakin tinggi komitmen organisasi aparatur, maka upaya pencegahan kecurangan akan semakin efektif. Oleh karena itu, instansi pemerintah perlu meningkatkan kualitas pengendalian internal serta membangun komitmen organisasi yang kuat guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan, Komitmen Organisasi.

Pendahuluan

Kecurangan merupakan tindakan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi ataupun finansial yang merugikan pihak lain (Christian and Veronica 2022), sehingga upaya pencegahan kecurangan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dalam setiap organisasi, terutama pada sektor publik dan pendidikan. Pentingnya penelitian mengenai pencegahan kecurangan didasarkan pada semakin meningkatnya praktik fraud di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan berdampak luas terhadap keuangan, tata kelola, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Pencegahan kecurangan melalui pengurangan peluang, penurunan tekanan, dan penghilangan rasionalisasi pelaku dinilai mampu menjadi penghambat utama terjadinya fraud, dengan indikator berupa kesadaran terhadap kecurangan, swakelola dan partisipasi, transparansi, akuntabilitas, ketertiban administrasi, pelaporan, serta saling percaya (Pratiwi and Handayani 2023). Fenomena kecurangan yang tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintahan dalam bentuk korupsi, tetapi juga merambah Perguruan Tinggi melalui penyalahgunaan aset dan pengadaan barang maupun jasa yang tidak transparan, menunjukkan bahwa pengawasan dan pengendalian internal masih belum berjalan optimal (Putri et al. 2023). Kondisi tersebut menimbulkan kerugian negara, kebocoran anggaran, penurunan efektivitas penggunaan dana, serta kegagalan pencapaian akuntabilitas keuangan akibat orientasi penilaian kinerja yang lebih menekankan pada penyerapan anggaran dibandingkan kualitas hasil yang dicapai (Primastiwi, Wardani, and Hanisah 2020). Oleh karena itu, penelitian mengenai pencegahan kecurangan menjadi sangat penting dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang mampu meminimalkan terjadinya fraud, memperkuat sistem pengawasan organisasi, serta meningkatkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Secara kumulatif pada periode 2004–2023, KPK paling banyak mengungkap kasus korupsi berupa penyuapan, gratifikasi, dan pengadaan barang/jasa, dengan mayoritas kasus terjadi pada pemerintah kabupaten/kota sebanyak 601 kasus, disusul 474 kasus di kementerian/lembaga dan 196 kasus di pemerintah provinsi (Bawaslu and Sidenreng 2025). Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan serius yang terjadi secara luas pada berbagai tingkat institusi dan belum dapat dikendalikan secara optimal. Kondisi ini menjadikan penelitian mengenai pencegahan kecurangan dan korupsi sangat penting dilakukan karena praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat efektivitas pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Pantauan ICW juga menunjukkan peningkatan kasus korupsi sejak 2019–2023 yang mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp42,7 triliun pada tahun 2022 dan meskipun menurun menjadi Rp28,4 triliun pada tahun 2023, jumlah tersebut tetap mencerminkan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan akibat buruknya pengelolaan keuangan, rendahnya transparansi, serta lemahnya akuntabilitas dalam

pengelolaan anggaran. Selain terjadi pada sektor pemerintahan, korupsi juga ditemukan pada perusahaan swasta, seperti kasus Bank Century yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor apabila sistem pengendalian dan pengawasan tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penelitian terkait pencegahan kecurangan menjadi sangat penting untuk menemukan faktor-faktor yang mampu memperkuat transparansi, meningkatkan akuntabilitas, meminimalkan peluang terjadinya fraud, serta mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas.



(Surya, 2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW menunjukkan kasus korupsi meningkat sejak 2019-2023, mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara pada 2022 sebesar 42,7 triliun, lalu menurun pada tahun 2023 sebesar 28,4 triliun. Hal ini disebabkan karena buruknya pengelolaan keuangan negara. Pemerintah melaksanakan beragam upaya terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya agar korupsi di lingkungan pemerintah dapat dicegah (Primastiwi and Tamansiswa 2021).

Berdasarkan berbagai fenomena kecurangan yang terjadi, menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif menjadi salah satu faktor utama dalam meminimalkan kecurangan, karena sistem ini berfungsi memberikan keyakinan memadai atas keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap regulasi (Putri, Kuntadi, and Pramukty 2023). Tidak efektifnya pengendalian internal menjadi kesempatan bagi karyawan berbuat penyimpangan yang merugikan organisasi, sehingga efektivitasnya menjadi sangat penting dalam pencegahan kecurangan (Lestari and Nurodin 2025). Berdasarkan teori Fraud Triangle, lemahnya pengendalian internal meningkatkan kesempatan melakukan kecurangan, sedangkan pengendalian yang kuat mampu mendeteksi dan mencegah tindakan seperti pencurian, penggelapan, dan penyalahgunaan aset, sekaligus memastikan keakuratan

informasi untuk mendukung tujuan strategis perusahaan (Christian et al. 2024). Penelitian terdahulu juga memperkuat hal ini; Nisak et al. (2017) menunjukkan perbaikan pengendalian internal mempengaruhi penurunan potensi kecurangan secara signifikan, dan temuan lain oleh Putri (2021), Romadaniati (2020), serta Megawati (2023) menemukan pengaruh positif pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Akan tetapi, Alfira & Christina (2023), Hakim (2022), serta Ayem & Kirana (2020) mengungkapkan hasil berbeda, dimana penelitian mereka mengungkapkan sistem pengendalian internal mempengaruhi pencegahan kecurangan secara negatif.

Merujuk dari berbagai hasil temuan sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan pencegahan kecurangan, diduga ada faktor lainnya yang mempengaruhi hasil tersebut. Faktor tersebut dapat menguatkan ataupun melemahkan hubungan posisi faktor lainnya. Salah satu faktor yang dianggap berpengaruh terhadap hubungan sistem pengendalian internal dalam pencegahan penipuan yaitu komitmen organisasi yang diartikan sebagai komitmen yang terbentuk oleh seluruh komponen individual dalam melaksanakan fungsi organisasi. Komitmen dapat tercapai jika seseorang dalam organisasi melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai wewenang dan fungsinya (Suci, et al 2020). Selain sebagai variabel bebas, komitmen organisasi juga bertindak sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, kebaruan dari temuan ini terletak pada penambahan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Keberhasilan sistem pengendalian internal dalam upaya pencegahan kecurangan dapat didukung dengan komitmen organisasi (Dwiyanti, Wicaksono, and Ulum 2022). Komitmen organisasi mencerminkan kesatuan tekad seluruh anggota organisasi, dimulai dari manajemen puncak sampai pegawai di semua level (Putri et al.,2023). Karyawan yang berkomitmen tinggi cenderung patuh terhadap aturan dan prosedur, menjaga integritas, serta mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi, sehingga mereka lebih terdorong untuk mencegah penyimpangan dan menjaga reputasi perusahaan. Tingginya komitmen karyawan berkaitan dengan rendahnya tingkat kecurangan karena rasa tanggung jawab dan kepatuhan yang kuat terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan optimal dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel (Fitria et al., 2025). Dengan demikian, komitmen organisasi menjadi fondasi penting bagi penerapan kontrol yang disiplin dan konsisten, sekaligus menegaskan perlunya strategi pengelolaan sumber daya manusia yang meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan untuk mendukung tata kelola yang baik dan pencegahan kecurangan dalam operasional perusahaan. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal dalam mencegah penipuan sangat dipengaruhi tingkat komitmen karyawan akan organisasi. Komitmen ini memungkinkan mereka berkontribusi lebih besar dalam menjaga integritas sistem dan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi. Hal ini menggarisbawahi

pentingnya strategi manajemen SDM yang fokus pada peningkatan loyalitas dan keterlibatan karyawan untuk mendukung tata kelola yang baik dan efektif dalam mencegah penipuan di berbagai aspek operasional perusahaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei yang dilakukan pada beberapa instansi pemerintahan di Kota Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan objek penelitian berfokus pada variabel yang diteliti dalam lingkungan sektor publik. Penelitian dilaksanakan pada Maret hingga April 2024 dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria ASN yang telah bekerja di sektor publik selama kurang lebih satu tahun. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran 90 kuesioner, dimana sebanyak 85 kuesioner kembali dan dapat diolah, sedangkan 5 kuesioner tidak kembali, sehingga tingkat respons penelitian mencapai 94%. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kuantitatif untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.

Tabel 1 Distribusi Kuesioner

Deskripsi	Jumlah Kuesioner
Kuesioner yang disebar	90
Kuesioner yang tidak kembali	5
Kuesioner yang digunakan	85
Tingkat Respon = $85/90 \times 100\%$	94%

Sumber: Data primer, diolah, 2025

Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pengendalian Internal	85	16	25	21,09	2,212
Pencegahan Kecurangan	85	18	25	21,84	2,101
Komitmen Organisasi	85	45	80	64,15	7,569

Sumber: Data primer, diolah, 2025

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa variabel sistem pengendalian internal dengan jumlah responden 85 memiliki nilai minimum 16 dan maximum 25, nilai rata-rata 21,09 dengan standar deviasi sebesar 2,212. Variabel pencegahan kecurangan dengan jumlah responden 85 memiliki nilai minimum 18 dan maximum 25, nilai rata-rata 21,84 dengan standar deviasi sebesar 2,101. Variabel komitmen organisasi dengan jumlah responden 85 memiliki nilai minimum 45 dan maximum 80, nilai rata-rata 64,15 dengan standar deviasi sebesar 7,569.

Uji Hipotesis 1

Tabel 6 Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficient		Std Coeff β	Sig.	Result
	B	Std. Error			
Constant	2,541	1,844		,000	
SPI (X)	0,502	0,061	0,528	,000	diterima
F-value	99,285			,000	
R ² Square	0,708				
Adjusted R ²	0,701				

Sumber: Data primer, diolah, 2025

Uji parsial bertujuan mengidentifikasi pengaruh variabel bebas yang diinput ke dalam model regresi secara individual terhadap variabel terikat. Maka dari itu, hasil yang didapat dari variabel sistem pengendalian internal berdampak parsial senilai $0,000 < 0,005$.

Uji Hipotesis 2

Tabel 7 Moderated Regression Analysis (MRA)

Model	Predicti on Sign	Unstandardized Coefficient		Std. Coeff. Beta	Sig.
		β	Std. Error		
Regresi 1					
(Constant)		2,541	1,378		0,000
X	(+)	0,502	0,061	0,528	0,000
Regresi 2					
(Constant)		11,217	1,308		0,000
X	(+)	0,090	0,097	0,098	0,356
X*Z	(+)	0,006	0,001	0,758	0,000

Hasil analisis diatas menunjukkan interaksi antara variabel dependen (X) dan variabel moderator (Z) mempunyai koefisien 0,006 dengan nilai t 7,407 dan sig. 0,000 yang menunjukkan bahwa variabel Z berhasil memoderasi pengaruh variabel X terhadap Y signifikan secara statistik (sebab nilai sig < 0,05). Jadi, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berhasil memoderasi dampak sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Pengaruh Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, di mana nilai koefisien beta sebesar 0,502 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin efektif upaya pencegahan kecurangan. Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah tidak hanya menekankan pada aspek prosedural (hard control), tetapi juga pada soft control seperti etika, integritas, kejujuran, disiplin, kompetensi, dan komitmen. Fungsi sistem pengendalian internal meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, serta dokumentasi informasi guna mendukung tercapainya tujuan organisasi (Ayem & Kusumasari, 2020). Dengan terlaksananya fungsi tersebut secara optimal, potensi kecurangan dapat diminimalkan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan (Manfa, 2022). Temuan ini sejalan dengan teori reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya perbaikan sistem secara menyeluruh dan terstruktur dalam penyelenggaraan pemerintahan (Wardani et al., 2021), di mana sistem pengendalian internal menjadi instrumen penting dalam mewujudkan good governance. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (Dewi & Pusposari, 2025). Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas responden sebesar 52,94% menyatakan setuju bahwa sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam pencegahan kecurangan, yang menunjukkan adanya kesadaran ASN terhadap pentingnya implementasi pengendalian internal yang efektif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan analisis sistem pengendalian internal yang tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pengawasan formal berbasis hard control, seperti prosedur, pengendalian administrasi, dan kepatuhan organisasi, tetapi juga mengintegrasikan soft control berupa integritas, etika, kejujuran, disiplin, kompetensi, dan komitmen ASN dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu karena menempatkan perilaku individu dan budaya organisasi sebagai bagian penting dari efektivitas pengendalian internal. Selain itu, penelitian ini mengaitkan sistem pengendalian internal dengan perspektif reformasi birokrasi sebagai kerangka konseptual dalam menjelaskan terciptanya tata

kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance. Kebaruan lainnya terletak pada bukti empiris yang diperoleh dari berbagai instansi pemerintah daerah di Kota Yogyakarta, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai implementasi sistem pengendalian internal dalam sektor publik. Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan kecurangan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya sistem dan prosedur organisasi, tetapi juga oleh kesadaran moral, pemahaman, dan komitmen ASN dalam menjalankan sistem pengendalian internal secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa integrasi antara hard control, soft control, budaya organisasi, dan reformasi birokrasi menjadi faktor utama dalam menciptakan pencegahan fraud yang berkelanjutan dan mendukung terwujudnya good governance.

Sistem Pengendalian Internal yang dimoderasi oleh Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan

Sistem pengendalian internal yang dimoderasi oleh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi interaksi sebesar $0,000 < 0,05$ serta koefisien interaksi ($B = 0,006$) yang bernilai positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal tidak hanya ditentukan oleh kekuatan mekanisme formal (hard control), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku (soft control), khususnya komitmen organisasi yang mencerminkan loyalitas, keterikatan emosional, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan terhadap pimpinan (Hanifah, Kuntadi, dan Pramukty, 2023). ASN yang memiliki tingkat komitmen organisasi tinggi cenderung lebih memahami prosedur pengendalian, memiliki kepatuhan yang lebih baik terhadap kebijakan organisasi, serta mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dalam mendeteksi potensi risiko dan celah kecurangan, sehingga integritas pelaksanaan pengendalian internal dapat terjaga dengan lebih optimal (Kristanti, Kuntadi, dan Pramukty, 2023). Secara teoretis, temuan ini konsisten dengan perspektif reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan, adaptif, dan akuntabel melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia dan komitmen organisasi (Supono dan Dewata, 2024), di mana keberhasilan reformasi birokrasi sangat dipengaruhi oleh loyalitas, integritas, dan tanggung jawab moral aparatur (Sulastri, 2025). Selain itu, hasil deskriptif menunjukkan bahwa mayoritas responden sebesar 40,00% menyatakan sangat setuju bahwa komitmen organisasi memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal dalam pencegahan kecurangan, sehingga mempertegas bahwa faktor perilaku memiliki peran determinan dalam mendukung efektivitas sistem formal organisasi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan secara simultan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, dimensi soft control, dan perspektif reformasi birokrasi dalam menjelaskan pencegahan kecurangan pada sektor publik daerah. Penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada pengaruh langsung sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan atau menempatkan komitmen organisasi sebagai variabel independen biasa, sehingga belum banyak penelitian yang secara khusus menguji bagaimana komitmen organisasi mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud. Penelitian ini menghadirkan perspektif baru bahwa keberhasilan pencegahan kecurangan bukan hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur, aturan, dan mekanisme pengawasan formal, tetapi juga oleh kualitas loyalitas, keterikatan emosional, tanggung jawab moral, dan kesadaran ASN dalam menjalankan sistem tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor perilaku individu dalam organisasi. Kebaruan lainnya terletak pada penekanan bahwa komitmen organisasi berfungsi sebagai penguat efektivitas hard control melalui pembentukan budaya organisasi yang berintegritas, disiplin, dan antikecurangan. Artinya, sistem pengendalian internal akan bekerja lebih optimal apabila didukung oleh aparatur yang memiliki rasa memiliki terhadap organisasi dan kesadaran untuk menjaga tujuan organisasi secara kolektif. Selain memberikan kontribusi teoritis melalui integrasi konsep pengendalian internal dan reformasi birokrasi, penelitian ini juga memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif karena dilakukan pada berbagai instansi pemerintah daerah di Kota Yogyakarta, sehingga mampu memperluas bukti empiris mengenai pentingnya interaksi antara sistem formal dan faktor perilaku dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada good governance.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin efektif upaya pencegahan kecurangan dalam organisasi. Selain itu, komitmen organisasi terbukti mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Artinya, keberhasilan sistem pengendalian internal dalam mencegah kecurangan akan semakin optimal apabila didukung oleh tingginya komitmen organisasi ASN, seperti loyalitas, tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan organisasi. Dengan demikian, seluruh hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan diterima, sehingga rumusan masalah

mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan serta peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi telah terjawab.

Saran

Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan pengawasan pengendalian internal, memberikan hukuman yang tegas bagi pelaku kecurangan, serta melakukan upaya pencegahan melalui pengecekan berkala, evaluasi rutin, dan sosialisasi guna memperkuat komitmen aparatur dan mengurangi penyimpangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar menggunakan sampel yang lebih beragam dari berbagai daerah agar hasil lebih representatif, memadukan kuesioner dengan metode kualitatif seperti wawancara atau observasi untuk memperoleh data yang lebih mendalam, dan menambah variabel lainnya seperti budaya organisasi, kepemimpinan, ataupun sistem insentif agar analisis lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih holistik.

Daftar Pustaka

- Anita Ardiyanti, Yudi Nur Supriadi. 2018. "Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang." 3(1): 1–20.
- Ayem, Sri, and Mison Sergianus. 2022. "Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Laba Dan Struktur Modal Terhadap Kualitas Laba." *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19(3): 625–35.
- Bawaslu, Kinerja, and K A B Sidenreng. 2025. "Pengelolaan Anggaran Pemilu Terhadap Parepare Tahun 2025."
- Bhakti, Ilham Dio. 2024. "Peranan Pengendalian Internal Dalam." 1(2): 750–59.
- Christian, Natalis, and Joelyn Veronica. 2022. "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 8(1): 91–102.
- Dewi, I Gst. A.A. Sintya Purnama, and Devi Pusposari. 2025. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi." 2(4): 671–84.
- Firmansyah, Vicky Zaynul, and Firdaus Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Birokrasi Di Indonesia." 7(2): 325–44. doi:10.32697/integritas.v7i2.817.

- Fitria Akibun¹, Juwita Pratiwi Biki², Fellia Mariana Timbert³. 2025. "Pengaruh SPI , SIA , Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah : Perspektif Pemangku Kepentingan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . Dalam." 1(April): 21–30.
- Hanifah, Afifah Muannis, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. 2023. "Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance." *Jurnal Economina* 2(6): 1318–30. doi:10.55681/economina.v2i6.605.
- Kristanti, Oktavilia, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. 2023. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal: Peran Audit Internal, Karakteristik Auditor Internal, Dan Kualitas Audit Internal." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2(8): 2899–2911. doi:10.55681/sentri.v2i8.1304.
- Kusuma, Tobby Putra, Dava Surya Setyadi, Ivan Wisnu Andaru, Ali Roziqin, and Jawa Timur. 2022. "Reformasi Birokrasi Dalam Aspek Efisiensi Dan Transparansi Pada Pelayanan Birokrasi Pemerintahan Kota Batu." 7(1): 1–9.
- Lamawitak, Paulus Libu, Emilianus Eo, and Kutu Goo. 2021. "PENGARUH FRAUD DIAMOND THEORY TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) PADA KOPERASI KREDIT PINTU AIR." 5(Juni): 56–67.
- Lestari, Windah, and Idang Nurodin. 2025. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Dan Audit Internal Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Kecurangan)." 10(204): 2575–94.
- Mendrofa, Herry Pasrani, Bambang Supriadi, Shinta Happy Yustiari, and Arief Fahmi Lubis. 2025. "Analisis Efektivitas Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia Analysis of the Effectiveness of Bureaucratic Reform in Improving the Quality of Public Services in Indonesia." 8(1): 537–45. doi:10.56338/jks.v8i1.6811.
- Muis, Muhammad Ras, J Jufrizen, and Muhammad Fahmi. 2018. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 1(1): 9–25. doi:10.36778/jesya.v1i1.7.
- Nurfitriyani¹, Tyara Nur Roudhatul Jannah², Mellinda Baby Alyssa Dwiprana³, Indah Ayu Lestari⁴. 2024. "Analisis Pentingnya Peran Etika Bisnis Dalam Mencegah Fraud Keuangan Di Indonesia." 4(2): 258–78.
- Pratiwi, Nurna, and Anik Puji Handayani. 2023. "Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Oleh Aparat Desa Di Kabupaten Kulonprogo." *Jurnal Akuntansi Dewantara* 7(1): 66–77.

- Primastiwi, Anita, Dewi Kusuma Wardani, and Hanisah Hanisah. 2020. "Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sektor Publik." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 6(1): 30–36. doi:10.29303/jseh.v6i1.76.
- Putri, Tiara Eka, Cris Kuntadi, and Rachmat Pramukty. 2023. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Peran Audit Internal, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi." *Jurnal Economina* 2(7): 1789–1802. doi:10.55681/economina.v2i7.674.
- Raharjo, Santosa Budi, Usran Masahere, and Wahyu 2021 Widodo. "Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Komitmen Organisasi Sebagai Strategi Peningkatan Kinerja Dan Loyalitas Karyawan : Studi Tinjauan Literatur." 4(1): 143–56.
- Rahayu, Fransiska, and Luh Dina Ekasari. 2021. "Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi." 8(2): 129–34.
- Rahmany, Rizqa Najmi, and Anna Nurlita. 2024. "Pengaruh Investment Opportunity Set (Ios), Pertumbuhan Laba, Konservatisme, Dan Alokasi Pajak Antar Periode Terhadap Laba (Perusahaan Manufaktur Industri Dasar Dan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 -2022)." *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)* 03(01): 107–21.
- Raja Yoga Gustika Arnel. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)." 4(1).
- Sinambela, Ella Anastasya. 2012. "Studi Tentang Kinerja Karyawan Ditinjau Dari Keberadaan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal." : 58–70.
- Suandew, Ni Kadek Ayu. 2021. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan." : 29–49.
- Subhaktiyasa, Putu Gede. "Evaluasi Validitas Dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Kuantitatif : Sebuah Studi Pustaka." 5(4): 5599–5609.
- Sulastri, Endang. 2025. "Jebital : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital." 2: 2021–25.
- Supono, and Mukti Fajar Nur Dewata. 2024. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas, Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas." *Jurnal Esensi Hukum* 6(1): 15–30.

Windari, Yunistira. 2024. "Peningkatan Kinerja Melalui Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Pada Pegawai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan." 6(2): 593–615.

Wardani, D. K., Prabowo, A. A., & Anugrah, K. A. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Whistleblowing System Sebagai Variabel Moderating The Effect Of Organizational Commitment And Community Participation On The Village. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 6(2), 1–16.

Zelmiyanti, Riri, and Lili Anita. 2015. "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening." 8(10): 67–76.